

Aplikasi Siskeudes Sebagai Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa Sulawesi Selatan)

Ayu Auliyah¹ dan Samirah Dunakhir² ✉

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

This study aims to find out how good the use of the Siskeudes Application is in Financial Management in the Village Government. The population of this study is Financial Management in Belapunranga Village, Parangloe District, Gowa Regency, South Sulawesi, while the sample in this study uses the Results of Financial Management for Fiscal Year 2021. Data collection is carried out using documentation, while the data analysis technique used is competitive descriptive analysis using index measurements rough fit. The results showed that overall the use of the Siskeudes Application in Financial Management with 5 indicators namely planning, implementation, administration, reporting and accountability can still be said to be quite appropriate/good enough with a percentage of 73% of 100%.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui seberapa baik Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Desa. Populasi penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan Hasil Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kompetitif dengan menggunakan pengukuran indeks kesesuaian kasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan dengan 5 indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih dapat dikatakan cukup sesuai/cukup baik dengan persentase 73% dari 100%.

Keywords:

Siskeudes; Village Financial Management

* Korespondensi penulis pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan No. 1 Gunung Sari, Makassar 90221 Sulawesi Selatan, Indonesia. E-mail: samirah.dunakhir@unm.ac.id (author#2).



1. Pendahuluan

Di era globalisasi ini, tata kelola keuangan perlu dikembangkan untuk menghasilkan pembangunan yang bertanggungjawab. Dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia dibutuhkan sebuah organisasi pemerintahan desa yang tangguh serta Di era globalisasi ini, tata kelola keuangan perlu dikembangkan untuk menghasilkan pembangunan yang bertanggungjawab. Dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia dibutuhkan sebuah organisasi pemerintahan desa yang tangguh serta tata kelola desa yang tepat. Karena pada dasarnya, kewenangan yang diberikan kepada desa saat ini adalah amanat masyarakat desa yang tercatat sebagai mandate dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa untuk dapat membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat desa secara mandiri. (Raharjo, 2021:4)

Dalam membuat laporan keuangan terkadang aparat desa menghadapi masalah dalam hal ketepatan waktu. Sehingga laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diagendakan. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan suatu aplikasi pengelolaan keuangan yakni Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes bertujuan untuk memudahkan aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan baik pada tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Kelebihan Aplikasi Siskeudes yaitu memudahkan tata kelola keuangan desa serta didesain secara sederhana dan user friendly sehingga memudahkan aparat desa dan masyarakat untuk mengakses aplikasi ini.

Desa Belapunranga merupakan salah satu desa dari 121 desa di Kabupaten Gowa yang menerapkan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan. Sebelum adanya Aplikasi Siskeudes dalam hal pengelolaan keuangan dikerjakan dengan menggunakan Aplikasi Microsoft Excel.

Dalam penggunaan aplikasi harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar berjalan dengan baik. Permasalahan yang ada setelah adanya Aplikasi Siskeudes yaitu mengenai SDM yang ada di Desa Belapunranga. Kurangnya pemahaman aparat desa dalam penggunaan Aplikasi mengakibatkan penggunaan yang kurang maksimal. Masalah lain yang dihadapi yaitu terkait jaringan internet yang kurang stabil, sehingga berdampak pada keefektifitasan dalam mengakses Aplikasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

2. Kajian Literatur

2.1. Perlakuan Akuntansi untuk UMKM



Akuntansi

2. Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini memiliki dua variable penelitian yaitu penggunaan aplikasi siskeudes dan pengelolaan keuangan desa. Populasi dalam penelitian adalah Pengelolaan Keuangan di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Sampel yang digunakan adalah Hasil Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2021 di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kompetitif yang telah ditetapkan oleh Arikunto.

3. Hasil and Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti mengukur variabel penggunaan Aplikasi Siskeudes menggunakan Indeks Kesesuaian Kasar (IKK) yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil yang ditemukan bahwa penggunaan Aplikasi Siskeudes Desa Belapunranga dalam Pengelolaan Keuangan mulai dari tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah mencapai 100% namun pada tahap perencanaan masih mencapai 25% yang dikualifikasikan tidak sesuai. Dan pada tahap pelaksanaan mencapai 67% yang dikualifikasikan cukup sesuai. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Belapunranga dapat dikatakan cukup sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dimana Pengelolaan Keuangan dilaksanakan beberapa tahap diantaranya:

1. Tahap Perencanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa terkait rancangan APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD melalui musyawarah BPD. Rancangan APB Desa Belapunrangan dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 Desember 2020 bertempat di Aula Pertemuan Kantor Desa Belapunranga yang dihadiri oleh Aparat Desa, anggota BPD dan Tokoh Masyarakat. Hasil dari kesepakatan bersama tersebut lalu diinput oleh Operator Aplikasi Siskeudes kedalam menu perencanaan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil dokumentasi terhadap dokumen lampiran 5, 6, dan 7. Namun terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat dibuktikan dan melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri. Maka pada tahapan perencanaan dikatakan tidak sesuai.



2. Tahap Pelaksanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati. Desa Belapunranga memiliki Buku Tabungan sendiri yang telah disetujui oleh Bupati/Wali Kota atas nama Desa Belapunranga Kec. Parangloe. Kaur dan Kasi Desa Belapunranga menyampaikan laporan akhir realisasi kepada Kepala Desa pada tanggal 10 Januari 2022. Berkas-berkas tersebut lalu di input oleh Operator Aplikasi Siskeudes kedalam menu penganggaran. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumentasi terhadap dokumen lampiran 8, 9, dan 10. Namun waktu pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri. Maka pada tahapan pelaksanaan dapat dikatakan cukup sesuai.

3. Tahap Penatausahaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur Keuangan Desa Belapunranga mencatat segala penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada Sekretaris Desa. Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum pada tanggal 30 Oktober 2021 yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa Belapunranga. Berkas-berkas tersebut lalu diinput oleh Operator Aplikasi Siskeudes dalam menu penatausahaan. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumentasi terhadap dokumen lampiran 11 dan 12. Maka tahapan penatausahaan dapat dikatakan sesuai.

4. Tahap Pelaporan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Kepala Desa Belapunranga menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama tahun anggaran 2021 pada tanggal 9 Juli 2021 kepada Bupati melalui Camat. Lalu Operator Aplikasi Siskeudes menginput data pelaporan dalam menu pelaporan. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumentasi terhadap dokumen lampiran 13 dan 14. Maka tahapan penatausahaan dapat dikatakan sesuai.

5. Tahap Pertanggungjawaban



Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa Belapunranga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati melalui Camat pada hari Senin, 7 Februari 2022. Lalu laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho yang terpajang di depan Kanto Desa Belapunranga. Laporan pertanggungjawaban ini juga dapat diakses oleh Operator Aplikasi Siskeudes dalam Aplikasi. Hal ini dapat dibuktikan dari dokumentasi terhadap dokumen lampiran 15, 16, dan 14. Maka tahapan pertanggungjawaban dapat dikatakan sesuai.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa Sulawesi Selatan, maka ditarik kesimpulan bahwa Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Belapunranga cukup sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Walaupun pada tahapan perencanaan dikatakan tidak sesuai, namun jika ditarik kesimpulan secara keseluruhan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan dengan 5 indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih dapat dikatakan cukup sesuai/cukup baik dengan persentase 73% dari 100%. Dalam hal penginputan Aplikasi Siskeudes masih mengalami kendala terkait jaringan di Desa Belapunranga walaupun Pemerintah Desa telah mengupayakan WiFi serta tower jaringan namun sampai saat ini jaringan masih kurang stabil.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memiliki saran untuk aparat desa yaitu sebaiknya dokumen-dokumen penting disimpan dalam 1 arsip dan digolongkan berdasarkan tahun anggaran. Sehingga dikemudian hari apabila dibutuhkan tidak akan tercecer dan lebih mudah untuk ditemukan. Dan dalam hal ketepatan waktu menyampaikan laporan diusahakan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Reference

Acha. (2018). Tanya Jawab Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Dipetik 28 Januari 2022, dari <https://www.keuangandes.info/2018/12/tanya-jawab-siskeudes-sistem-keuangan-desa.html#:~:text=Siskeudes%20atau%20Sistem%20Keuangan%20Desa%20adalah%20sebuah%20aplikasi,Desa%20%28APBDes%29%20dan%20Laporan%20Realisasi%20APBDes%20semua%20desa.>



- Agus, P., & Madya, W. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Keuangan Desa. Dipetik 12 Juni 2022, dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-cimahi-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa-2019-11-05-c27eb8fe/>
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta.
- Artini, N. M. D., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Konteks Disiplin Diri pada Desa Tigawas, 8 (2). <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14108>
- Astuti, S. (2021). Analisis Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa.
- Atintyasputri, A. A. W. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi, 2 (2), 169-193. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>
- Basori, A. (2016). Buku Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). Bogor: Pusdiklatwas BPKP
- BPKP. (2017). Keunggulan Aplikasi Siskeudes. Dipetik 28 Januari 2022, dari <http://www.bppk.go.id/berita/read/18255/0/Keunggulan-Aplikasi-Siskeudes-bppk>
- Idris, H., & Syachbrani, W. (2023). Studi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 25-32.
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R.A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa, 4 (1), 1-24. <https://doi.org/10.24252/jiap.v4i1.5159>
- Kalorbobir, Y.M., Siregar, B., & Badrudin, R. (2021). The Effect of Village Financial System Applications on Village Financial Management Accountability with Organization Commitment as Mediating, 6 (11).
- Lusiono, E. F., & Suharman. (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, 5 (1), 163-172. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.535>
- Miles, & Huberman, A.M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu, 3(1), 1-21.
- Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Abdurrahman dan Muhiddin.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rahaarjo, M. M. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahaarjo, M. M. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009-2018). Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Sumargo, B. (2020). Teknik Sampling. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI): Jakarta.



Santoso, P. B., & Hamdani, M. (2007). *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Semarang: PT Gelora Aksara Pratama.

Suprpto, R. N. F. A. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Suprpto, R. N. F. A. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo..

ISSN 2830-4438



9

772830

443005